

STATUS SALINAN

No. Dokumen 009/SOP-PK/PTUN.SMD

Revisi Ke 00

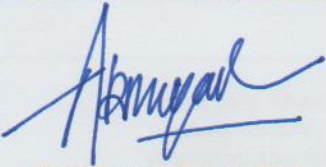

Tgl Terbit 29 November 2017



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN BANDING

Samarinda, 29 November 2017

LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI	DIBUAT
 Tedi Romyadi, S.H., M.H. KETUA PTUN SAMARINDA	 Winarji Dian Kenedi, S.H. PANITERA MUDA PERKARA

 <p>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659 Website: http://ptun-samarinda.go.id Email: informasi@ptun-samarinda.go.id</p>	No. Dokumen	009/SOP-PK/PTUN.SMD
	Revisi Ke	00
	Tgl Terbit	29 November 2017
	Halaman	1/3
	Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN BANDING		

TUJUAN :	
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam layanan penerimaan perkara banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
RUANG LINGKUP :	
Prosedur ini mencakup proses penanganan layanan penerimaan perkara banding yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap penerimaan perkara banding tersebut adalah berkas perkara siap didaftarkan.	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA 2. S1-Hukum
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendaftaran Perkara Banding 2. SOP Pemeriksaan Perkara Banding 3. SOP Penanganan Register Perkara Banding 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Banding 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Laptop / Komputer 3. Jaringan Internet 4. Buku Ekspedisi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak akan tercapai.	Berkas Perkara Banding
DEFINISI :	
1. Banding	: upaya para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan pada tingkat pertama (PTUN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut.
DOKUMEN PENDUKUNG :	
<ul style="list-style-type: none"> - Akta Permohonan Banding (014/FR-PK/PTUN.SMD) - SKUM (019/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Permohonan Banding - Surat Kuasa (Jika menggunakan Kuasa) - Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding - Bukti Setor ke Bank 	



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132
 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659
 Website: <http://ptun-samarinda.go.id> | Email: informasi@ptun-samarinda.go.id

No. Dokumen	009/SOP-PK/PTUN.SMD
Revisi Ke	00
Tgl Terbit	29 November 2017
Halaman	2/3
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN BANDING**

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Meja III	Panitera Muda Perkara	Kasir	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan upaya hukum Banding dari pihak/ Kuasa Hukum Pembanding								1 (satu) hari	Diterimanya permohonan banding
2	Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum banding dari pihak pembanding termasuk surat kuasa							<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan banding - Surat kuasa (bila menggunakan kuasa) - ATK 		Terperiksanya kelengkapan permohonan Banding
3	Menaksir dan menetapkan biaya panjar pernyataan banding							<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan banding - Surat kuasa (bila menggunakan kuasa) - ATK 		Ditetapkannya panjar biaya banding
5	Melengkapi SKUM Panjar Biaya Banding							<ul style="list-style-type: none"> - Blangko SKUM - Nomor Rekening Pengadilan - Surat permohonan banding - Surat kuasa (bila menggunakan kuasa) - ATK 		Tersedianya pengantar pembayaran ke Bank
6	Menerima bukti penyetoran panjar biaya permohonan banding yang telah disetor ke Bank/ Membubuhkan cap lunas							<ul style="list-style-type: none"> - Bukti setor ke BANK - ATK 		Terdatanya kelengkapan biaya proses permohonan banding



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132
 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659
 Website: <http://ptun-samarinda.go.id> | Email: informasi@ptun-samarinda.go.id

No. Dokumen	009/SOP-PK/PTUN.SMD
Revisi Ke	00
Tgl Terbit	29 November 2017
Halaman	3/3
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Samarinda

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN BANDING**

7	Mencatat keuangan permohonan banding dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding serta menginput ke SIPP							<ul style="list-style-type: none"> - Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding - ATK 	Tercatatnya keuangan perkara banding dalam buku jurnal secara baik serta terinputnya ke SIPP
8	Membuat akta permohonan banding							<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Permohonan - ATK 	Dibuatnya Akta Permohonan Banding
9	Menandatangani akta permohonan banding							<ul style="list-style-type: none"> - Draft Akta Permohonan Banding - Berkas Perkara - ATK 	Ditandatanganinya Akta Permohonan Banding
10	Penyerahan akta permohonan banding kepada pemanding							<ul style="list-style-type: none"> - Akta Memori Banding 	Disampaikannya Akta Permohonan Banding kepada Pemohon